

TESIS

KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM
PENILAIAN TERHADAP PERMOHONAN YANG TIDAK DITANGGAPI
OLEH BADAN DAN/ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN

Diajukan guna memenuhi tugas akhir
Program Pasca Sarjana

Dosen Pembimbing:
Prof. Dr. YULIANDRI, S.H, M.H.,
Dr. YUSLIM, S.H, MH.,



Disusun Oleh:

ANDI NOVIANDRI
1620112018

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, JULI 2018

**KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN TATA USAHA NEGARA
DALAM PENILAIAN TERHADAP PERMOHONAN YANG TIDAK
DITANGGAPI OLEH BADAN DAN/ATAU PEJABAT
PEMERINTAHAN**

ANDI NOVIANDRI, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas
Andalas

ABSTRAK

Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman telah ditegaskan dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), telah membawa perubahan yang signifikan terhadap kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara, dimana kompetensi yang semula terbatas kemudian menjadi lebih luas. Selain itu, dalam Pasal 53 UUAP tersebut juga mengatur kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal sikap diam Badan dan/atau Pejabat pemerintahan atas permohonan warga masyarakat, sedangkan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UUPTUN) kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal sikap diam Badan dan/atau Pejabat pemerintahan pada hakekatnya telah diatur. Hal ini menarik bagi penulis untuk membahasnya lebih lanjut dalam penelitian ini dengan rumusan masalah: 1). Bagaimana kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam penilaian terhadap permohonan yang tidak ditanggapi oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; 2). Bagaimana implikasi hukum terhadap perbedaan pengaturan dalam Pasal 3 UUPTUN dengan Pasal 53 UUAP atas permohonan yang tidak ditanggapi oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan Undang-Undang. Alat pengumpul data yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kedua peraturan tersebut mengatur hal yang sama, yaitu tentang kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara atas permohonan yang tidak ditanggapi oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, namun terhadap materi tersebut terdapat konsekuensi hukum yang berbeda, selain itu terdapat pula perbedaan mengenai mekanisme dan upaya hukum yang digunakan dalam hal tersebut. Perbedaan pengaturan dalam Pasal 3 UUPTUN dengan Pasal 53 UUAP atas permohonan yang tidak ditanggapi oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tersebut juga membawa implikasi hukum yaitu timbulnya konflik norma.

Kata Kunci : kompetensi absolut, Peradilan Tata Usaha Negara, permohonan, tidak ditanggapi oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintah, implikasi hukum.

THE ABSOLUTE COMPETENCE OF STATE ADMINISTRATIVE
COURTS IN THE ASSESMENT OF PETITION THAT IS NOT
RESPONDED BY GOVERNMENT AGENCY AND / OR OFFICIAL

ANDI NOVIANDRI Postgraduate Program Faculty of Law Andalas
University.

ABSTRACT

The existence of the State Administrative Court as a part of judicial power executor had been confirmed in the amendment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The imposition of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration has brought significant change towards absolute competence of administrative justice, in which the limited competence became broader. Besides, The article 53 Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration also regulates the absolute competence of State Administrative Court in the case of the silence of government agency and/or official towards the members of society's petition. Moreover, the article 53 Law Number 5 of 1986 concerning Administrative Justice states that the absolute competence of state administrative court in the case of the silence of Government agency and/or official had actually been regulated. It is interesting for the writer to do a further discussion with the following problems of study: (1) how is the absolute competence of administrative justice in the assessment of the petition that is not responded by government agency and/or official; (2) how is the legal implication in regard to the difference regulation in the article 3 Law Number 5 of 1986 concerning Administrative Justice and article 53 Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration of the petition that is not responded by the government agency and/or official. This research applies normative law research by case approach and laws. The method to collect the data is documentary method or library research. The result of the research shows that even though the mentioned laws regulate the same matter, that is concerning absolute competence of administrative justice of the petition that is not responded by the government agency and/or official, there is different legal consequence on those materials. Besides, there are also several differences concerning mechanism and legal effort used in the mentioned matter. The difference of regulation in article 3 Law Number 5 of 1986 concerning Administrative Justice and article 53 Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration of the petition that is not responded by the government agency and/or official also brings legal implication such as norm conflict.

Keywords: absolute competence, administrative justice, petition, not responded by government agency and/or official, legal implication.